

**MATRIK RENCANA KERJA
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN NEGERI PONTIANAK KELAS I A
TAHUN 2020**

No.	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
1	2	3	4	5	6
A.	Pencanangan Zona Integritas				
1.	Mencanangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Pontianak	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Negeri Pontianak dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Negeri Pontianak dan masyarakat	1. Komitmen Bersama Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak	Komitmen Bersama seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak	6 Januari 2020
			2. Penandatanganan Pakta Integritas seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak	Pakta Integritas seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak	6 Januari 2020
			3. Penandatanganan Piagam Pencanangan Zona Integritas disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta dipublikasikan melalui website, banner dan media massa (koran, televisi)	Piagam Pencanangan Zona Integritas Pengadilan Negeri Pontianak	25 Februari 2019
B.	Pembangunan Zona Integritas				
1.	Area I : Manajemen Perubahan	1. Penyusunan Tim Kerja	1. Membuat Undangan pembentukan Tim	1. Undangan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM 2. Berita Acara dan laporan pelaksanaan seleksi 3. Notula Rapat, dokumen laporan pelaksanaan dan foto/dokumentasi pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM	5 – 7 Februari 2020
			2. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM		
			3. Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM melalui rapat harus mempertimbangkan integritas, kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak bermasalah, serta tidak pernah melanggar kode etik dan disiplin.		
			4. Mengesahkan Tim Kerja WBK/WBBM oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak		

		2. Dokumen rencana pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM	1. Pembuatan Rencana Aksi/Rencana Kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM oleh setiap penanggungjawab yang ditunjuk	1. Undangan, absensi serta foto 2. Dokumen rencana aksi 3. Dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi Zona Integritas	5 – 7 Februari 2020
			2. Menentukan Target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	1. Dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas 2. Dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI 3. Surat Keputusan Rencana Pembangunan Zona Integritas dan Target Prioritas	5 – 7 Februari 2020
			3. Proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh aparaturnya Pengadilan Negeri Pontianak maupun masyarakat melalui pengarahannya saat apel pagi, rapat staf secara periodik, pemasangan spanduk dan banner, website, brosur	1. Undangan, absensi serta foto 2. Notulen rapat/sosialisasi 3. Dokumen laporan sosialisasi 4. Spanduk dan banner 5. Website Pengadilan Negeri Pontianak 6. Brosur Pengadilan Negeri Pontianak	5 – 7 Februari 2020
		3. Terlaksananya Monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM secara berkala	1. Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi secara bulanan	1. Dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi/kerja yang telah dilaksanakan 2. Dokumentasi/foto kegiatan 3. Undangan, notulen, daftar hadir dan foto rapat 4. Dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi 5. Dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti	Setiap Bulan di Minggu Ke-2
			2. Membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi bulanan		
			3. Menyusun laporan tindak lanjut atas laporan monitoring dan evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Tim Zona Integritas		
		4. Perubahan Pola pikir dan Budaya Kerja Pengadilan Negeri Pontianak kearah yang lebih baik	1. Pemilihan Role Model	1. Dokumentasi proses pemilihan role model (undangan, notulen rapat, daftar hadir) 2. SK penunjukan role model dan SK kriteria role model) 3. BA Pemilihan Role Model	Pimpinan sebagai Role Model
			2. Pemberian reward dan punishment	1. Rekap absensi pegawai 2. Dokumentasi program reward dan punishment	1 tahun sekali
			3. Penandatanganan Pakta Integritas	1. Dokumen Pakta Integritas 2. Dokumentasi pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas	6 Januari 2020
			4. Apel pagi dan Apel sore	1. Absensi apel pagi dan apel sore 2. Dokumentasi pelaksanaan apel pagi dan sore	Setiap Senin dan Jumat
			5. Rapat berjenjang	1. Undangan, absensi, notulen rapat	Sewaktu-waktu jika

				2. Dokumentasi pelaksanaan rapat berjenjang	diperlukan
2.	Area II : Penataan Tata Laksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Penyusunan SOP	1. Dokumen peta bisnis Pengadilan Negeri Pontianak 2. Dokumen SOP yang sudah ditandatangani 3. Dokumen SOP Inovasi yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak	27 Februari – 4 Maret 2020
			2. Penerapan SOP		
			3. Evaluasi/Perbaikan SOP		
		2. E-Office/E-Government	1. Sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi (Komdanas, SIPP, aplikasi PNBPN)	1. Dokumen kinerja Pengadilan Negeri Pontianak yang diambil melalui aplikasi SIKEP 2. Dokumen manajemen SDM yang diambil melalui aplikasi SIKEP 3. Capture website dan SIPP	27 Februari – 4 Maret 2020
			2. Sistem kepegawaian berbasis sistem informasi (SIKEP)		
			3. Sistem pelayanan public berbasis teknologi informasi		
		3. Keterbukaan Informasi Publik	1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	1. Capture anggaran DIPA melalui website 2. Foto spanduk/banner dan website 3. Undangan rapat, notulen dan daftar hadir 4. Dokumen hasil laporan monitoring dan evaluasi	27 Februari – 4 Maret 2020
			5. Telah memiliki website dengan informasi terkini yang memudahkan masyarakat pencari keadilan		
			6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Tiap bulan di Minggu ke-4
3.	Area III : Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia /SDM	1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Perencanaan kebutuhan pegawai di Pengadilan Negeri Pontianak dalam hal ini rasio dengan beban kerja dan kualifikasi pendidikan serta mengacu pada peta jabatan hasil analisis beban kerja	1. Undangan, notulensi, daftar hadir dan foto rapat 2. Dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja 3. Surat usulan kebutuhan pegawai 4. Dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja bagian 5. SK mutasi/rotasi internal 6. Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/DRH (Daftar Riwayat Hidup) 7. Dokumen monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja 8. Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (sasaran Kinerja Pegawai) 9. Surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya 10. Surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/pengembangan kkompetensi lainnya 11. Daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya 12. Dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan	27 Februari – 4 Maret 2020
			2. Melakukan Monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai pada Pengadilan Negeri Pontianak		
		2. Pola Mutasi Internal	1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal		
			2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal		
			3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal		
		3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Telah melakukan upaya pengembangan kompetensi (capacity building/transfer knowledge)		
			2. Terdapat kesempatan/hak bagi pegawai Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		
			3. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi		
		4. Penetapan Kinerja Individu	1. Memiliki penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		
			2. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		
			3. Telah melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik		
			4. Hasil penilaian kinerja individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai		

			dengan pemantauan	kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja	
		5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode etik perilaku pegawai	1. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode etik perilaku pegawai melalui penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 2. Sistem Informasi kepegawaian melalui pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara terbuka	13. Dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya 14. Dokumen SKP berjenjang (JFU, atasan langsung/kasubbag, panmud, Panitera, Sekretaris, WKPN dan KPN) 15. Dokumen pengukuran kinerja individu per bulan	
		6. Sistem Informasi Kepegawaian pada Pengadilan Negeri Pontianak telah dimutakhirkan secara berkala	1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur pada Pengadilan Negeri Pontianak 2. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur Pengadilan Negeri Pontianak 3. Meningkatnya disiplin SDM aparatur Pengadilan Negeri Pontianak 4. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Pontianak 5. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Pengadilan Negeri Pontianak		
4.	Area IV : Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Kinerja Pengadilan Negeri Pontianak 2. Meningkatnya akuntabilitas Pengadilan Negeri Pontianak	1. Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Pontianak dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki, strategi pencapaian serta ukuran keberhasilan.	1. Undangan, Notulen, daftar hadir, foto rapat 2. Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran 3. Dokumen perjanjian kinerja	28 Januari 2020
			2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Undangan, notulen, daftar hadir, foto rapat 2. Dokumen pemantauan pencapaian kinerja secara bulanan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak 3. Dokumen perencanaan kerja jangka pendek (Renja) Tahunan, rencana Strategis (Renstra) serta Penetapan Kinerja 4. Dokumen penetapan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, survey kepuasan masyarakat) serta mendukung pengendalian gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan penanganan pengaduan masyarakat. 5. Dokumen IKU yang mendukung peningkatan pelayanan publik	28 Januari 2020
5.	Area V : Penguatan Pengawasan	1. Pengendalian Gratifikasi	1. Pengadilan Negeri Pontianak telah memiliki Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi	1. Capture banner/spanduk/website Pengendalian Gratifikasi 2. SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Pengendalian Gratifikasi 3. Capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya. 4. Bukti pengiriman LHKPN dan LHKASN	05 Februari – 13 Maret 2020
			2. Melakukan implementasi pengendalian gratifikasi		
			3. Disiplin melaporkan LHKPN dan LHKASN		

			5.Laporan Gratifikasi	
	2.Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Membangun lingkungan pengendalian 2.Melakukan penilaian resiko pada Pengadilan Negeri Pontianak 3.Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 4.Melakukan sosialisasi, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dokumen matrik identifikasi resiko 2.Dokumen analisis resiko 3.Dokumen level resiko 4.Dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi 	05 Februari – 13 Maret 2020
	3.Pengaduan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat baik melalui website Pengadilan Negeri Pontianak 2.Melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat 3.Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil penanganan pengaduan masyarakat 4.Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1.SK Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Tentang Petugas Pengaduan Masyarakat 2.Foto petugas/ruang/loket/kotak khusus pengaduan 3.Foto spaduk/banner informasi sarana penyampaian pengaduan 4.Capture sarana pengaduan melalui website/ SIWAS 5.Capture respon pengaduan masyarakat 6.Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada Panitera Muda Hukum. 7.Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan 8.Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada Panitera Muda Hukum untuk ditindaklanjuti 9.Dokumen tindaklanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas laporan dan evaluasi laporan pengaduan 	Setiap bulan di Minggu ke-3 di hari Senin
	4.Whistle Blowing System (WBS)	<ol style="list-style-type: none"> 1.Menerapkan Whistle Blowing System (WBS) 2.Melakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) 3.Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penerapan Whistle Blowing System (WBS) 	<ol style="list-style-type: none"> 1.Dokumen dan foto internalisasi Whistle Blowing System (WBS) 2.Dokumen laporan hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) 3.Dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System (WBS) 	Setiap bulan di Minggu ke-3 di hari Senin
	5.Penanganan Benturan Kepentingan sesuai Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Benturan Kepentingan dan SK Sekma Nomor 59A Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.	<ol style="list-style-type: none"> 1.Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama 2.Implementasi kebijakan penanganan benturan kepentingan 3.Melakukan evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 4.Menindaklanjuti hasil evaluasi atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan 5.Sosialisasi penanganan benturan kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> 1.SK KPN Tentang Petunjuk Pelaksanaan Benturan Kepentingan 2.Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama. 3.Dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan 4.Dokumen laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan 5.Dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan Benturan kepentingan. 	05 Februari – 13 Maret 2020

6.	Area VI : Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1.Meningkatnya kualitas pelayanan Publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman dan lebih mudah dijangkau) 2.Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan Publik.	1.Memiliki Standar Pelayanan Minimal	1.Dokumen Standar Pelayanan pada Pengadilan Negeri Pontianak 2.Capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan 3.Dokumen SOP pelaksanaan standar pelayanan 4.Dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 5.Dokumentasi pengarahan pelayanan prima kepada Petugas PTSP oleh Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Pontianak 6.Capture sarana informasi layanan 7.Pemberian reward dan punishment 8.Capture aplikasi, sarana dan prasarana Pelayanan Terpadu (PTSP) 9. Capture inovasi pada pelayanan 10. Dokumen laporan survey 11. Capture dan foto 12. Dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat	06 Januari – 28 Februari 2020
			2.Memaklumkan Standar Pelayanan		
			3.Memiliki SOP bagi pelaksana standar pelayanan		
			4.Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		
			5.Melakukan pengarahan pelayanan kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Pontianak		
			6.Menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat dalam memperoleh informasi layanandan kegiatan melalui papan pengumuman, brosur, banner dan website		
			7.Telah terdapat system punishmant/reward bagi pelaksana layanan.		
			8.Menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)		
			9.Terdapat Inovasi Layanan		
			10. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan		
7.	Indikator Hasil	1. Terwujudnya Aparatur Pengadilan Negeri Pontianak yang bersih dan bebas dari KKN	1. Nilai persepsi korupsi (survei eksternal) 2. Presentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) 3. Data yang dipakai dalam pelaporan ini data primer yang dikumpulkan melalui instrument kuesioner	1. Dokumen Laporan hasil Survei persepsi korupsi 2. Diinformasikan kepada masyarakat melalui website. 3. Melaporkan kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum setiap 6 bulan	28 Februari – 6 Maret 2020
		2. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan public kepada masyarakat	Nilai indeks persepsi kualitas pelayanan yang disyaratkan ≥ 3 (80%) dari Skala 1-4		

Menyetujui, Pontianak, 02 Maret 2020

Tim Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Pontianak

Pembina



POMPAL SAGALA,SH.,MH.
NIP. 19620302 199212 1 001

Tim Pembangunan Zona Integritas

Pengadilan Negeri Pontianak

Ketua



Dr. H. PRAYITNO IMAN SANTOSA, SH.,MH
NIP. 19620822 199212 1 001